

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T. Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gunakaya Widiada, 2019, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Handayani Retna Wardani Sri, 2021, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Suluh Media Yogyakarta.
- Harahap. Yahya. M, 2021, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harifin A. Tumpa, 2009, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Prenada Media, Makassar.
- Mahfiana, L. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak Asasi Anak: Studi Wilayah Kepolisian Resot Kabupaten Ponorogo*.
- Mardjono Reksodiputro, 2020. *Sistem Peradilan Pidana*, Depok.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni: Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

- Renggong Ruslan, *Hukum Acara Pidana*, Jilid 2, Kencana, Jakarta.
- Riyanti, Apriani, et al. 2023. *Hukum dan HAM*. Widina Bhakti Persada), Bandung.
- Rukmini, M. (2003). *Perlindungan HAM melalui asas praduga tidak bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*. Alumni.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sujatmoko, Andrey, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Syamsuddin, A. (2008). *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, dan pengacara*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tutik Tri Wulan, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, 2008.
- Usmawadi, *Dalam Buku Materi Pendidikan Latihan Dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium Hukum FH Unsri, Palembang.
- Wasty Soemanto. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi (Karya Ilmiah)*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Yanto, 2020, *Kajian Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia*, Kepel Press, Yogyakarta.
- Zainul Bahri, 1996, *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik*, Angkasa Bandung.

## **B. Jurnal**

- Sulistono, E. (2019). *Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2).
- Remaja, I. N. G. (2018). *Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Manusia yang Harus Dijamin oleh Negara*. *Kertha Widya*, 6(1).

- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3).
- Arfiani, Arfiani Arfiani, et al., 2020 "Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum. *Riau Law Journal* 6.1 (2022).
- Dalam Penyidikan Kepolisian*, Jurnal Hukum Syiah Kuala Vol. 1 No. 2, Agustus 2017.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Bandung, hlm. 25.
- \_\_\_\_\_. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Surabaya: Bina Ilmu. Hlm. 105.
- Ulhaq, A. Mahbub. "Kedudukan Penyidik Kepolisian Terhadap Kewenangannya Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Menurut Perspektif Sistem Peradilan Pidana". *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5.2 (2023), hlm. 1209.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 24
- Suswanto, et.all, *Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.1 No.1, (2018).
- Putrajaya, N. S. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-13.

- Husni Djalil, M. Nur Rasyid Dan Nazaruddin, Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian, Jurnal Hukum Syiah Kuala Vol. 1 No. 2, Agustus 2017, hlm. 147.
- RM Bagus Trisardono R, Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Tersangka/Terdakwa Di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Mandala Nursa, Vol. 4. No. 4, (2020).
- Rusfandi, Rusfandi, and Anita Anita. "Peranan Penasehat Hukum dalam Mendampingi Tersangka pada Proses Penyidikan." Jurnal Jendela Hukum 9.2 (2022), hlm. 213.
- Sadi, Muhamad, 2021, Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), Cetakan 1, Kencana, JAKARTA, hlm. 96.
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 20.
- Nazaruddin, Nazaruddin, Husni Djalil, and M. Nur Rasyid. "Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie)." Syiah Kuala Law Journal 1.2 (2017), hlm. 147.

### **C. Undang-undang**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau DUHAM.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (PERMENKUMHAM RI) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

